

**SKRIPSI**

KK

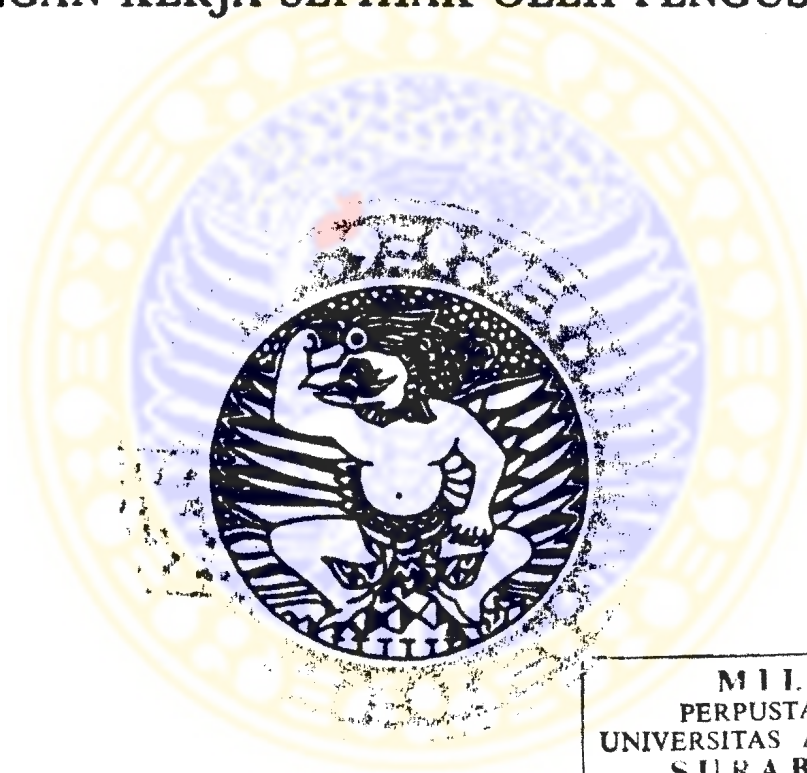
AN 12 / 02

Kri

t

***DWI ANUGERAH KRISTANTI***

**TINJAUAN YURIDIS KEPMENAKER NOMOR  
KEP.-150/MEN/2000 TENTANG PEMUTUSAN  
HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PENGUSAHA**



**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
2002**

**TINJAUAN YURIDIS KEPMENAKER NOMOR  
KEP.-150 / MEN / 2000 TENTANG PEMUTUSAN  
HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PENGUSAHA**

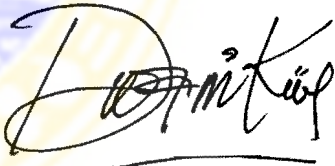
**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**

**Lanny Ramli, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 131 878 388**

**Penyusun,**



**Dwi Anugerah Kristanti**  
**NIM. 039710208 U**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a Buruh yang umumnya dikenal sebagai golongan lemah, selalu berada pada posisi yang dirugikan kepentingannya. Sedangkan pihak pengusaha oleh karena kewenangannya dapat menentukan kebijakan untuk kepentingan pengusaha.

Buruh untuk melangsungkan hidupnya secara tidak langsung dipaksa untuk menerima keputusan yang ditetapkan oleh pengusaha, meskipun hal tersebut dirasakan sangat berat. Artinya, buruh lebih banyak mengorbankan hak dan kewajibannya.

- b Adanya Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Kepmenaker No. 150/ 2000 menyatakan dengan jelas bahwa PHK tidak dapat begitu saja dilakukan. Tapi, harus sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Kepmenaker 150/2000. Apabila buruh tidak melakukan kesalahan berat, buruh tidak dapat di PHK begitu saja. Melainkan hanya diberi peringatan atau pun teguran akan kesalahannya. Kecuali, buruh telah melakukan kesalahan berat seperti yang tercantum dalam pasal 18 ayat 1 Kepmenaker 150/2000.

## 2. Saran

- a Angka pengangguran di Indonesia makin hari semakin bertambah
- b Mengingat pasal 27 UUD1945, bahwa....”Setiap warga negara berhak atas pekerjaan atau penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam hal ini pengusaha seharusnya menghormati hak buruh sebagai manusia demi kehidupannya.
- c Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Surabaya, Jawa Timur selaku lembaga yang berwenang dalam penyelesaian ini diharapkan lebih mendengarkan suara buruh.
- d Pemerintah sebaiknya membuat peraturan baru mengenai PHK sepihak oleh pengusaha berupa sanksi yang cukup tegas. Karena, selama ini yang terlihat hanya peraturan yang dikhususkan untuk buruh saja. Hal ini dapat mengakibatkan kesewenang-wenangan pengusaha dalam mem-PHK buruh. Diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan masalah buruh yang sering terjadi di Indonesia.